

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah : komitmen organisasi sebagai variabel moderating, antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.1.Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul	Variabel	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Arvindya Rivito dan Sri Mulyani (2019) dengan penelitian berjudul “The Effect Of Budget Participation on Local Government Performance With Organizational Commitment as Moderating Variable”	Budget Participation, Local Government Performance, Organizational Commitment as Moderating Variable	Kuantitatif	Hasil dari penelitian adalah partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, dengan diperkuat oleh komitmen organisasi sebagai variabel moderating.

2.	Syambudi Prasetya Bahri (2012) dengan penelitian berjudul “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik pada Instansi Pemerintah (Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon)”	Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas Publik pada Instansi Pemerintah	Kuantitatif	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas publik yaitu sebesar 64,1 tetapi ada faktor lain yaitu sebesar 35,9% dipengaruhi oleh faktor lain.
3.	Metta (2014) meneliti dengan penelitian berjudul “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Pemerintah Kota Parepare)”	Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kuantitatif	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan pada perencanaan anggaran dan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran dan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah namun pelaksanaan anggaran serta evaluasi kinerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4.	Purwanto (2009) meneliti dengan judul “Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah dengan keadilan distributif,	Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kinerja Pemerintah Daerah, Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural dan <i>goal</i>	Kuantitatif	Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : Partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh signifikan dan menunjukkan semakin tinggi partisipasi dalam

	keadilan prosedural, dan <i>goal commitment</i> sebagai variabel moderating)”	<i>commitment</i> sebagai variabel moderating		penyusunan anggaran semakin tinggi pula kinerja pengelolaan keuangan daerah.
5.	Maria Hehanusa (2010) dengan penelitian berjudul “Pengaruh partisipasi penganggaran terhadap kinerja aparat: integrasi variabel intervening dan variabel moderating pada pemerintah kota Ambon dan pemerintah kota Semarang”	Partisipasi penganggaran, kinerja aparat, integrasi variabel intervening dan variabel moderating	Kuantitatif	Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : Partisipasi penganggaran berpengaruh pada kinerja aparat melalui kepuasan kerja. Budaya individu sebagai variabel moderating tidak berpengaruh terhadap hubungan partisipasi penganggaran dan kinerja aparat dan ada perbedaan dimensi budaya Hofstede antara aparat yang bekerja pada pemerintah Kota Ambon dan aparat yang bekerja pada pemerintah Kota Semarang.
6.	Andarias Bangun (2009) melakukan penelitian tentang “Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD dengan pengawasan internal sebagai variabel pemoderasi di Pemerintah	Partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi, kinerja manajerial SKPD, pengawasan internal sebagai variabel pemoderasi	Kuantitatif	Hasil dari penelitian adalah : Secara stimulan seluruh variabel independen berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD. Hasil analisa secara parsial terdapat satu variabel independen yang tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD yaitu tentang kejelasan sasaran anggaran. Pengawasan internal tidak dapat

	Daerah Kabupaten Deli Serdang”			memoderasi pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD.
7.	Arifah Nur Sabrina (2009) melakukan penelitian tentang “Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah: budaya organisasi dan komitmen organisasi sebagai variabel moderating di daerah Karasidenan Surakarta”	Partisipasi penyusunan anggaran, kinerja aparat pemerintah daerah, budaya organisasi dan komitmen organisasi sebagai variabel moderating	Kuatitatif	Hasil dari penelitian adalah sebagai berikut : Bahwa tidak ada pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.
8.	I Ketut Suryanawa (2008) melakukan penelitian tentang “Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran pada kinerja manajerial dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi”.	Partisipasi penyusunan anggaran, kinerja manajerial, komitmen organisasi sebagai variabel moderasi (Penelitian Kuantitatif)	Kuantitatif	Hasil dari penelitian adalah sebagai berikut : Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa partisipasi anggaran secara signifikan dan positif mempengaruhi kinerja manajerial. Hasil tes kedua bahwa komitmen organisasi tidak dapat memperkuat hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial.

Berikut perbedaan dan persamaan dari hasil penelitian terdahulu yang

ditinjau dari beberapa aspek seperti objek penelitian, variabel penelitian , jenis penelitian serta hasil penelitian yang dapat dilihat dari hubungan variabel-variabel yang ada dengan rincian sebagai berikut :

1. Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syambudi Prasetya Bahri (2012) dilakukan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon. Sedangkan penelitian oleh Haspiarti (2012) dilakukan di Pemerintahan Kota Parepare.

2. Variabel Penelitian

Partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan komitmen organisasi digunakan dalam penelitian ini. Pada penelitian sebelumnya oleh Syambudi Prasetya Bahri (2012) dan Haspiarti (2012) variabel penelitiannya adalah penerapan anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas publik pada Instansi Pemerintah.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah penelitian kuantitatif.

4. Hasil Penelitian

Hasil penelitian terdahulu oleh Syambudi Prasetya Bahri (2012) adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik instansi pemerintah. Sedangkan hasil penelitian

terdahulu oleh Haspiarti (2012) adalah perencanaan anggaran, implementasi/perencanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas instansi pemerintah.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Partisipasi Penyusunan Anggaran

Menurut Brownel dalam Coryanata (2004:619) partisipasi adalah perilaku, pekerjaan, dan aktifitas yang dilakukan oleh aparat pemerintah selama aktivitas penyusunan anggaran berlangsung. Partisipasi penyusunan anggaran diperlukan agar anggaran yang dibuat sesuai dengan realita/kenyataan yang ada. Anggaran menurut Munandar (2000) adalah perencanaan secara sistematis meliputi kegiatan pemerintahan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.

Dalam partisipasi anggaran pada akuntansi sektor pemerintahan menurut Mardiasmo (2002), terdapat empat siklus anggaran yaitu sebagai berikut :

a. Tahap persiapan anggaran

Taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang telah tersedia dilakukan pada tahapan ini. Terkait dengan itu maka perlu diperhatikan sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, yaitu dengan melakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Perlu juga disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran.

b. Tahap Ratifikasi

Proses politik yang cukup rumit dan berat terdapat dalam tahap ratifikasi. Pimpinan eksekutif dituntut memiliki *managerial skill*, *political skill*, dan *coalition building* yang mumpuni. Integritas dan kesiapan mental (*coalition building*) sangat penting, karena pimpinan eksekutif harus mampu menjawab dan berargumen yang rasional atas segala pernyataan dan bantahan dari pihak legislatif.

3 Tahap implementasi /pelaksanaan anggaran

Manajer keuangan pemerintah harus memperhatikan tahap ini karena merupakan tahapan yang sangat penting. Dalam hal ini sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen harus dipunyai manajer keuangan publik. Sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran merupakan tanggung jawab manajer keuangan publik.

4 Tahap pelaporan dan evaluasi anggaran

Aspek akuntabilitas terkait dengan tahap pelaporan dan evaluasi. Diharapkan pelaporan dan evaluasi anggaran tidak akan menemukan banyak masalah jika pada tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik. Manfaat dari partisipasi penyusunan anggaran menurut Muhammad (2007) adalah dalam penyusunan anggaran semakin mudah dan cepat apabila banyak aparat pemerintah yang terlibat. Namun demikian partisipasi dalam penyusunan anggaran juga memiliki suatu keterbatasan. Menurut Siegel dan Marconi (1989) partisipasi akan

memungkinkan terjadinya perilaku disfungsional. Perilaku yang tidak sesuai dengan aturan yang sedang berlaku adalah perilaku disfungsional dalam hal ini, dan aparat pemerintah di berikan kesempatan untuk ikut serta dalam penyusunan anggaran untuk menghindari adanya perilaku disfungsional.

1.2.2 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan bagi instansi pemerintah yang telah diamanatkan oleh para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan melalui pelaporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Pelaksanaan penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan dengan penyusunan perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003. Pengukuran kinerja yang memuat anggaran berbasis kinerja dilaksanakan untuk mengetahui hasil pencapaian program dengan visi dan misi instansi pemerintah dengan keluaran utamanya adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja. Laporan ini digunakan sebagai umpan balik bagi para penyelenggara pemerintahan. Informasi yang relevan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja digunakan bagi para pengguna laporan yaitu pejabat atau unsur pimpinan eksekutif pemerintah, unsur pengawasan dan unsur perencanaan.

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, harus didasari pada prinsip - prinsip sebagai berikut :

1. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan
2. Penggunaan sumber-sumber daya berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin secara konsisten dengan peraturan perundangundangan yang berlaku
3. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
4. Pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh
5. Jujur, objektif, transparan, dan akurat
6. Keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menurut Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003, pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, antara lain:

1. Rencana Strategis

Rencana Strategis berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul akan diperhitungkan. Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya dimuat dalam Rencana strategik instansi pemerintah.

2. Perencanaan Kinerja

Rencana kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis akan ditetapkan dalam perencanaan kinerja. Rencana kerja tahunan adalah hasil dari proses perencanaan kinerja.

3. Pengukuran Kinerja

Penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah dilaksanakan dalam tahapan pengukuran kinerja. Penilaian pencapaian setiap indikator memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis dilakukan juga pada tahapan ini.

4. Pelaporan Kinerja

Bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran adalah Laporan kinerja. Pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja merupakan hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja.

1.2.3 Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi menurut Weiner dalam Coryanata (2004:619) adalah dorongan dari dalam individu untuk berbuat sesuatu agar keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dapat ditunjang dan kepentingan organisasi lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan sendiri. Keberhasilan suatu organisasi dalam partisipasi penyusunan anggaran dipengaruhi oleh dorongan yang ada pada setiap individu dan kinerja manajerial dapat ditingkatkan dengan dorongan yang ada pada setiap individu.

Komitmen organisasi menurut Porter (1974) adalah kuatnya pengenalan dan keterlibatan seseorang dalam suatu organisasi tertentu. Sedang pendapat Becker's (1990) bahwa individu yang menggunakan *side-bets theory* cenderung memiliki bentuk komitmen organisasi berupa *continuance commitment*, dimana dari pada mereka mencari pekerjaan lain lag, individu lebih memilih tetap bekerja pada satu organisasi. Penyebabnya adalah akumulasi manfaat yang lebih tinggi apabila tetap bekerja pada satu organisasi dibandingkan mencari pekerjaan lain, misalnya uang pensiun, fasilitas dan senioritas.

Tiga komponen menurut Allen dan Meyer (1990:78) didalam komitmen organisasi yaitu :

- a. *Affective commitment* yaitu suatu kondisi dimana karyawan ingin terlibat dan mengidentifikasi diri dengan organisasi. Hal ini berkaitan dengan karyawan merasa terdapat kesesuaian dengan nilai-nilai dalam organisasi atau seberapa jauh tingkat emosi keterlibatan langsung dalam organisasi.
- b. *Normative commitment* yaitu komitmen yang muncul pada karyawan dimana

karyawan merasa berkewajiban untuk tinggal dalam organisasi seperti kesetiaan, kebanggaan, kesenangan, kebahagiaan, dan lain-lain

- c. *Continuance commitment* yaitu komitmen yang timbul dari kekhawatiran terhadap kehilangan manfaat yang biasa diperoleh dari organisasi atau tetap tinggal karena merasa memerlukannya.

Komitmen organisasi dipengaruhi faktor-faktor antara lain karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, dan pengalaman kerja (dalam Tri Mardiana, 2004:175). Tiga komponen dalam komitmen organisasi yaitu keyakinan yang kuat dari seseorang dan penerimaan tujuan organisasi, kemauan seseorang untuk berusaha keras bergantung pada organisasi, dan keinginan seseorang yang terbatas untuk mempertahankan keanggotaan. Semakin kuat kecenderungan seseorang untuk diarahkan pada tindakan sesuai dengan standar, semakin kuat komitmen (dalam Imronudin, 2004:4). Organisasi menganggap komitmen penting karena : (1) Pengaruhnya pada *turnover*, (2) Hubungannya dengan kinerja yang mengasumsikan bahwa individu yang memiliki komitmen cenderung mengembangkan upaya yang lebih besar pada pekerjaan (Morrison, 1997).

1.3 Keterkaitan Antar Variabel

Agar anggaran yang dibuat bisa lebih sesuai dengan realita yang ada dilapangan memerlukan adanya partisipasi penyusunan anggaran. Bawahan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan sesuai tingkat tertentu bersama atasannya merupakan konsep dari partisipasi. Peningkatan kinerja diharapkan dapat dicapai dengan partisipasi, yaitu ketika suatu tujuan dirancang dan secara partisipatif

disetujui, maka karyawan akan menginternalisasikan tujuan yang ditetapkan dan memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya, karena mereka ikut terlibat dalam proses penyusunan anggaran tersebut. Sardjito dan Osmad (2007) dalam organisasi sektor publik, disebutkan bahwa semakin tinggi partisipasi anggaran maka semakin meningkat kinerja aparat pemerintah daerah.

Bahri (2012), hasil dari penelitiannya ditunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik berpengaruh sebesar 64,1 dan ada faktor lain yang juga berpengaruh sebesar 35,9%. Sedangkan dari penelitian Haspiarti (2012), menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Komitmen organisasi adalah sejauh mana tingkat kepercayaan dan penerimaan tentang kerja terhadap tujuan organisasi dan keinginan untuk tetap ada dalam organisasi tersebut. Komitmen organisasi adalah suatu hal yang lebih dan kesetiaan yang pasif terhadap organisasi, dengan kata lain hubungan pegawai dengan perusahaan atau organisasi secara aktif disiratkan, karena komitmen tinggi ditunjukkan dan ada keinginan untuk memberikan tenaga dan tanggungjawab yang lebih dalam menyokong kesejahteraan dan keberhasilan organisasi tempat bekerja.

I Ketut Suryanawa (2008) melakukan penelitian dan menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak dapat memperkuat hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial. Sardjito dan Osmad Muthaher (2007) yang meneliti Pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah: Budaya organisasi dan komitmen Organisasi sebagai variabel moderating,

ditemukan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel budaya organisasi dalam memoderasi partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah.

1.4 Kerangka Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pengaruh partisipasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating.

Menurut Brownel dalam Coryanata (2004:619) partisipasi adalah perilaku, pekerjaan, dan aktifitas yang dilakukan oleh aparat pemerintah selama aktivitas penyusunan anggaran berlangsung. Partisipasi penyusunan anggaran diperlukan agar anggaran yang dibuat sesuai dengan realita/kenyataan yang ada. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan bagi instansi pemerintah yang telah diamanatkan oleh para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan melalui pelaporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

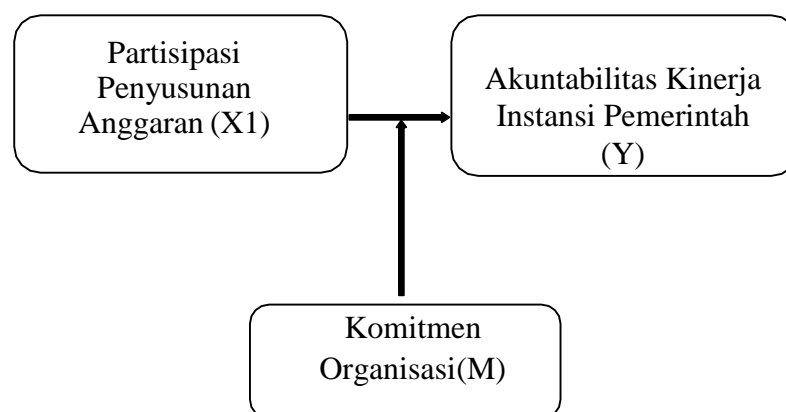
Komitmen organisasi menurut Weiner dalam Coryanata (2004:619) adalah dorongan dari dalam individu untuk berbuat sesuatu agar keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dapat ditunjang dan kepentingan organisasi lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan sendiri.

Peningkatan kinerja diharapkan dapat dicapai dengan partisipasi, yaitu ketika

suatu tujuan dirancang dan secara partisipatif disetujui, maka karyawan akan menginternalisasikan tujuan yang ditetapkan dan memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya, karena mereka ikut terlibat dalam proses penyusunan anggaran tersebut. Dengan komitmen organisasi maka terdapat keinginan untuk memberikan tenaga dan tanggungjawab yang lebih dalam menyokong kesejahteraan dan keberhasilan organisasi tempat bekerja. Sehingga kerangka konseptual diuraikan bahwa partisipasi penyusunan anggaran mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dimana komitmen organisasi sebagai variabel moderating yang mempengaruhi variabel dependen dan independen.

Secara skematis gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dituangkan sebagai berikut :

Gambar 2.1 : Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah : Komitmen Organisasi sebagai variabel moderating.



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasar landasan teori dan rumusan penelitian, diidentifikasi terdapat satu variabel independen yaitu partisipasi penyusunan anggaran, satu variabel dependen yaitu Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan komitmen organisasi sebagai variabel moderating. Hubungan antara partisipasi penyusunan

anggaran dan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dipengaruhi oleh komitmen organisasi.

1.5 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diambil dalam penelitian ini adalah :

- H1 : Partisipasi Penyusunan Anggaran memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang.
- H2 : Komitmen Organisasi memoderasi pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang.